



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Kedaulestan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 28 Februari 2018

Halaman: 1

**Macet di Mana-mana**  
**Yogya Butuh**  
**Pembatasan Kendaraan**

**YOGYA (KR)** - Hasil survei lembaga riset Inrix yang menyebut Kota Yogyakarta sebagai kota termacet keempat di Indonesia, menjadi peringatan bagi pemerintah daerah, baik Kota Yogyakarta maupun DIY. Salah satunya, dengan memberlakukan rekreasi lalu lintas yang lebih strategis. Namun langkah ini butuh kesiapan dan dukungan warga. Selain itu, pembatasan kendaraan dapat menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto, mengungkapkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan sepanjang tahun 2017 lalu, kecepatan rata-rata kendaraan saat puncak arus lalu lintas ialah 22 kilometer perjam. "Artinya itu belum sampai macet parah karena pada jam-jam tertentu laju kendaraan bisa lebih cepat. Tapi hasil survei itu tetap menjadi peringatan bagi kami," tandasnya, Senin (27/2).

Sejumlah ruas jalan yang menjadi titik kepadatan di antaranya

\* Bersambung hal 7 kol 1

**Yogya** Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangaji serta Jalan Maliboro. Sedangkan ruas paling padat hingga kecepatan kendaraan hanya 11 kilometer perjam berada di Jalan Timoho dari depan APMD hingga simpang UIN Sunan Kalijaga. Ruas jalan tersebut memiliki banyak hambatan seperti perlintasan kereta sebidang hingga pusat ekonomi dan pendidikan.

Golkari mengaku, sejumlah upaya manajemen lalu lintas dilakukan melalui rekreasi fisik serta teknologi. Rekreasi fisik di antaranya memperbaik jalur searah sedangkan rekreasi teknologi dengan menambah rambu berbasis area *traffic control system* (ATCS). "Tetapi, masalahnya sekarang iyalah penambahan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan," imbuhnya.

Oleh karena itu perlu dibutuhkan kesiapan masyarakat selaku pengguna jalan agar mengurangi kepadatan. Di antaranya dengan beralih menggunakan transportasi umum, tidak parkir di lokasi ter-

Sambungan hal 1

larang serta mematuhi setiap rambu. "Sangat memungkinkan diberlakukan sistem ganjil atau genap seperti di Jakarta maupun pembatasan unit kendaraan. Tapi kebijakan itu akan berhasil jika masyarakatnya siap," katanya.

Sementara terkait wacana pembatasan kendaraan, sebelumnya sudah diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad. Pembatasan tersebut hanya berlaku bagi kendaraan berdimensi besar seperti bus pariwisata yang hendak masuk pusat kota. Bentuknya berupa sistem *park and ride* serta *drop zone*. Akan tetapi kebijakan itu masih perlu dibahas bersama Pemda DIY lantaran akan bersinggungan dengan kabupaten lain.

Sistem *park and ride* tersebut yakni armada bersar diparkir di pinggiran kota kemudian disediakan armada penghubung yang dimensinya lebih kecil. Sedangkan *drop zone* dengan menyediakan lokasi antarjemput penumpang, sedangkan parkirnya di luar wilayah. (Dhi-d)  
anjut anggapi cetahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005